DINAS PERHUBUNGAN ACEH

Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara Nomor 52,
Banda Aceh

(0651) 22110

dishub.acehprov.go.id

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN ACEH

2020

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II 7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA 8
A. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8
B. Bidang Pelayaran 8
C. Bidang Penerbangan 9
D. Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda 10
E. UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja 10
F. UPTD Penyelenggara Terminal Tipe B 10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Aceh 11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22
BAB III 24
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 25
3.3 Program dan Kegiataan 30
BAB IV 32
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
4.1 Program 33
4.2 Kegiatan 33
BAB V 38
PENUTUP 38

LAMPIRAN TABEL 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prioritas utama Pemerintah Aceh dalam pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah harus menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan karena transportasi merupakan mekanisme kunci untuk meningkatkan, membangun dan membentuk perekonomian suatu wilayah. Penyelenggaraan transportasi berkelanjutan bertujuan melaksanakan kegiatan transportasi yang melayani tujuan utama sebagai penggerak ekonomi wilayah perkotaan dan pengembangan infrastruktur.

Dalam menciptakan transportasi yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian suatu wilayah, kegiatan trasnportasi harus mengedepankan aksesibilitas pada jaringan transportasi dan keragaman angkutan umum sehingga mendorong masyarakat pada penggunaan angkutan umum yang mengurangi volume kendaraan pribadi dan parkir; adanya kesetaraan dalam penyelenggaraan trasnportasi bagi seluruh lapisan masyarakat, persaingan bisnis angkutan umum yang sehat dan pembagian ruang serta pemanfaatan infrastruktur yang adil serta transparan dalam pengambilan kebijakan dengan tidak hanya memanfaatkan lahan untuk pembangunan jalan raya, adanya upaya menciptakan transportasi yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keselamatan pagi penggunanya sehingga dapat mengurangi kerugian akibat polusi udara dan kecelakaan transportasi, serta penghentian subsidi yang berlebihan untuk pengguna angkutan pribadi sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan angkutan umum massal dan dana dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat lain.

Dinas perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Transportasi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas pokok Dinas

Perhubungan untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di Bidang Perhubungan, yang memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh;
c. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem transportasi wilayah Aceh;
d. Pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai tambah (ekonomi); dan
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana kerja SKPD Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 mengacu kepada Surat Gubernur Aceh Nomor 050/11045 Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penyampaian Rancangan Akhir RENJA SKPA Tahun 2020, dimana setiap program kegiatan yang telah tertuang dalam RKPA menjadi acuan dalam penjabaran Rencana Kerja. Rancangan Akhir Renja SKPD juga mengacu kepada Renstra SKPA serta isu strategis dengan mempertimbangkan permasalahan transportasi di Provinsi Aceh untuk menciptakan sinkronisasi kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Disamping itu Rencana Kerja Pemerintah Provinsi juga terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyinkronkan kegiatan sesuai dengan kewenangan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen awal perencanaan Pembangunan Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen rencana strategis Pemerintah Aceh, sehingga penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah; dalam ketentuan umum menyebutkan Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rancangan Akhir Renja yang telah disepakati selanjutnya dijadikan acuan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBA) sehingga setiap program kegiatan yang tertuang dalam RAPBA sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun berjalan serta memuat program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Aceh. Penyusunannya dilaksanakan melalui evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Perhubungan.

Dalam proses untuk mencapai tujuan, Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan harus mengedepankan perencanaan transportasi daerah yang mendukung proses pembangunan Aceh. Oleh sebab itu perencanaan transportasi haruslah secara sistematis; mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan di capai Pemerintah Daerah. Dinas Perhubungan dalam hal ini haruslah memiliki peran sebagai "***Promoting Sektor***" artinya transportasi memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Transportasi berperan dalam

menunjang distribusi barang dan jasa dalam menghidupkan aktifitas sosio ekonomi masyarakat, transportasi memiliki dampak "***derived demand***" dimana dengan adanya pembangunan sektor transportasi akan menciptakan tumbuh sektor lain secara **"*multiple effect***". Dengan Rancangan Akhir RENJA tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas perhubungan Aceh dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari penyusunan dan evaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah atara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
14. Qanun Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh.
17. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD Penyelenggara Terminal Tipe B.
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja.
19. Surat Gubernur Aceh Nomor 050/11045 Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penyampaian Rancangan Akhir RENJA SKPA Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana kerja ini adalah sebagai usulan akhir Rencana Kerja yang menjadi panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA

Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut: sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menetukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 berjumlah **Rp. 228.444.862.858,-** dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Otsus dan Migas, dengan Rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut adalah :

Tabel 2

Rekapitulasi Sumber Dana APBA TA. 2018

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	%
1	ACEH	**201.989.064.720**	
	- PAA	23.982.948.882	10,5%
	- DAU / REGULER	24.502.433.734	10,7%
	- OTSUS ACEH	147.421.862.104	64,5%
	- MIGAS ACEH	6.081.820.000	2,7%
2	KAB/KOTA	**26.455.798.138**	
	- OTSUS	26.455.798.138	11,6%
	- MIGAS	-	-
	TOTAL	**228.444.862.858**	**100%**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBA Tahun 2018.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d Tahun 2018 disajikan sesuai dengan **Lampiran Tabel 2.1.**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka Dinas Perhubungan Aceh dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Kewenangan Dinas Perhubungan Aceh untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas adalah :

A. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat yang terpadu antar dan intra moda transportasi;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan darat.

B. Bidang Pelayaran

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait

angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

C. Bidang Penerbangan

1. Penyusunan rencana kebijakan kebandarudaraan, keamanan penerbangan dan angkutan udara yang terpadu antar moda transportasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kebandar udaraan;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan udara dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi udara;
4. Pelaksanaan pengendalian sistem operasional fasilitas kemanan penerbangan dalam rangka peningkatan keselamatan di bidang transportasi udara;
5. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kebandarudaraan, keamanan penerbangan dan angkutan udara;
6. Menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah serta mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari daerah bersangkutan.

D. Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan kegiatan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perkeretaapian, tata ruang dan lingkungan transportasi, pemaduan moda dan teknologi transportasi;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan teknis perkeretaapian, tata ruang dan lingkungan transportasi, pemaduan moda dan teknologi transportasi;
4. Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda;
5. Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda;
6. Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan sistem dan multimoda.

E. UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja

1. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bus Rapid Transit Trans Koetaradja, Angkutan Sewa, Angkutan Subsidi feeder dan Angkutan Subsidi Wilayah terpencil dan jasa perbengkelan;
2. Pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional lain dan bidang angkutan massal.

F. UPTD Penyelenggara Terminal Tipe B

1. Pelaksanaan operasional pelayanan keluar-masuk kendaraan antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi;
2. Pelaksanaan pelayanan angkutan orang di dalam terminal;

3. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal;
4. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dalam pelayana keselamatan, kehandalan, kenyamanan, keterjangkauan dan kesetaraan pada terminal Tipe B di wilayah Aceh.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur melalui indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Aceh dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 2.2.**

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Aceh

Sesuai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan berpedoman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD Penyelenggara Terminal Tipe B serta Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja.

Dalam setiap pelaksanaan pelayanan di Dinas Perhubungan Aceh, memiliki tujuan untuk mensukseskan Visi dan Misi Gubernur Aceh serta mendukung program kerja Kementerian Perhubungan. Salah satu visi misi Gubernur Aceh yang menjadi tolok ukur kesuksesan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan adalah mendukung misi "*Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, lingkungan yang berkelanjutan*", sehingga dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan transportasi mendukung pembangunan wilayah Aceh dan bernilai efektif dan efisien.

Pengembangan sistem transportasi di wilayah Aceh berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJM 2017-2022, dikelompokkan berdasarkan letak geografis, hal ini berperan dalam rangka pembinaan pelayanan dan peningkatan kinerja jaringan transportasi, dengan pengelolaan sebagai berikut :

Pelabuhan Laut di Aceh sampai tahun 2018 berjumlah sebanyak 11 unit yang tersebar di 6 (enam) Zona ATDC yaitu :

1. Zona Pusat terdapat 2 (dua) unit yang berada di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar;
2. Zona Utara terdapat 1 (satu) unit berada di Kota Lhokseumawe;
3. Zona Timur terdapat 2 (dua) unit yang berada di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa;
4. Zona Tenggara terdapat 1 (satu) unit tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil;
5. Zona Selatan terdapat 3 (tiga) unit yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Kabupaten Simeulue; dan
6. Zona Barat terdapat 2 (dua) unit pelabuhan laut yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya.

Sementara itu, jumlah Bandar Udara sampai tahun 2018 terdapat 11 unit, dengan perincian antara lain :

1. Zona Pusat terdapat 2 (dua) unit yang berada di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar;
2. Zona Utara terdapat 3 (tiga) unit berada di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Zona Tenggara terdapat 1 (satu) unit berada di Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Zona Selatan terdapat 3 (tiga) unit yang berada di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Kabupaten Simeulue; dan
5. Zona Barat terdapat 1 (satu) unit yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya.

Untuk Terminal Bus sampai tahun 2018 di Aceh terdapat sebanyak 34 unit, dengan perincian :

1. Zona Pusat terdapat 5 (lima) unit dengan perincian 2 unit berlokasi di Kota Banda Aceh, 1 unit berada di Kabupaten Aceh Besar dan 2 unit berada di Kabupaten Pidie;
2. Zona Utara terdapat 13 (tiga belas) unit, tersebar di Kabupaten Bireun (3 unit), Kota Lhokseumawe (2 unit), Kabupaten Aceh Utara (2 unit), Kabupaten Aceh Tengah (5 unit) dan Kabupaten Bener Meriah (1 unit);
3. Zona Timur terdapat 5 (lima) unit yang berada di Kabupaten Aceh Timur (2 unit), Kota Langsa (1 unit) dan Kabupaten Tamiang (2 unit);
4. Zona Tenggara terdapat 4 (empat) unit masing-masing tersebar di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Zona Selatan terdapat 4 (empat) unit tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Aceh Selatan (2 unit), Kabupaten Aceh Barat Daya (1 unit) dan Kabupaten Simeulue (1 unit); dan
6. Zona Barat terdapat 3 (tiga) unit, yang berada di 3 Kabupaten yaitu : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya.

Untuk Stasiun Kereta Api sampai dengan 2018 terdapat 3 Stasiun yang telah dibangun Oleh Kementerian Perhubungan Indonesia, meliputi :

1. Stasiun Krueng Maneh
2. Stasiun Bungkah
3. Stasiun Krueng Geukuh

Untuk pengoperasian stasiun hanya terdapat pada stasiun Krueng Maneh dan Stasiun Krueng Geukuh yang menghubungkan Aceh utara. Pengembangan Kereta Api oleh Kementrian Perhubungan telah direncanakan untuk mengaktifkan rel sepanjang 417,541 Km yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan rutenya adalah dari Sigli-Bireuen dan Lhokseumawe-Langsa-Besitang.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan meliputi pelayanan pada moda perhubungan darat, laut dan udara, dimana presentase peningkatan standar pelayanan fasilitas perhubungan dan indeks kepuasan pelayanan angkutan menjadi indikator untuk mengukur standar kinerja pelayanan perhubungan. Kinerja pelayanan dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas perhubungan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna layanan angkutan umum.

Untuk pembangunan yang bersinergi, maka setiap program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan Kementrian/Lembaga haruslah terkoordinasi dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan di sektor perhubungan. UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah jelas mengatur kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini menjadi dasar dalam setiap usulan program kegiatan. Kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya meliputi penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi, pengelolaan terminal type B, pembangunan dan pengoperasionalan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Untuk itu dalam musyawarah perencanaan pembangunan baik di level daerah maupun nasional saling bersinergi satu sama lain.

Berbagai kondisi di Bidang Perhubungan yang perlu mendapat perhatian khusus, permasalahan pembangunan secara umum yang terindentifikasi di sektor Perhubungan adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
2) Lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
3) Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan;
4) Belum terkoneksi dan terintegrasinya data dan informasi pembangunan;
5) Belum terbangunnya Sistem Satu Data Pembangunan dan terpadu;
6) Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;

7) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta konektivitas antar wilayah; dan
8) Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur.

Permasalahan tersebut dapat diuraikan berdasarkan tugas dan fungsinya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Konektivitas antar wilayah yang masih terbatas	Penataan jaringan pelayanan transportasi yang belum optimal	Ketidak jelasan kepemilikan dan pengelolaan aset infrastruktur transportasi;
		Terbatasnya prasarana dan sarana transportasi antar wilayah	Sistem transportasi masih belum optimal dalam meningkatkan efisiensi jaringan transportasi.
2	Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang dan lingkungan hidup	belum adanya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis provinsi dan rencana tata kelola lingkungan	regulasi dan kebijakan lebih rinci tentang RTR kawasan strategis;
			implementasi aksi peneurunan efek gas rumah kaca
		Penyelesaian dan koordinasi ketersediaan lahan untuk infrastruktur yang didanai program APBN di Aceh belum sepenuhnya terlaksana	Proses penyediaan lahan membutuhkan sinkronisasi dan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan ini.
3	Terbatasnya akses pada daerah kepualuan dan daerah terpencil	kurangnya fasilitas dan sarana transportasi laut dan penyeberangan	kurangnya kapal penyenberangan dan fasilitas pelabuhan penyeberangan di wilayah kepulauan
4	Belum terintegrasinya infrastruktur yang memberi daya dukung pariwisata dan mitigasi kebencanaan	Pelaksanaan kegiatan belum mencapai hasil akhir	belum tersedianya infrastruktur yang mampu memberikan standar operasional pelayanan.
5	Belum maksimalnya pemanfaatan transportasi sungai, danau untuk meningkatkan perekonomian daerah pedesaan	kurangnya minat pengguna jasa memanfaatkan transportasi sungai dan danau	Fasilitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan pelayaran sungai, danau yang masih sangat minim.
6	Masih tingginya angka kecelakaan transportasiyang terjadi	prasarana dan sarana transportasi yang belum memenuhi fasilitas keselamatan	Proses identifikasi terbatas penganggaran , sehingga harus menjalankan sistem perencanaan terbatas;
			Fasilitas keselamatan yang telah terpasang, rawan hilang/rusak atau terkena pelebaran jalan;
			Masih kurangnya sosialisasi keselamatan lalu lintas;
			Kewenangan status jalan menjadi hambatan dalam upaya penanganan, sedangkan Kab/Kota anggaran untuk fasilitas keselamatan sangat minim.

7	Proses P3D yang telah melimpahkan kewenangan infrastruktur dan pelayanan dari kabupaten pada provinsi	5 terminal yang tidak beroperasi dikarenakan prasarana dan personil yang terbatas	terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang operasional terminal;
			prasarana di terminal masih belum memenuhi standar pelayanan minimal, perlu di rehabilitasi.
8	masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi dari pada angkutan massal perkotaan/umum	Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan massal perkotaan/umum	Belum memadainya bus yang sesuai dengan kebutuhan;
			Dari 75 bus yang direncanakan untuk pelayanan prima hanya 30 Bus yang tersedia.
		Lemahnya pengawasan dalam Pengelolaan Angkutan Massal Trans Koetaradja	Belum tersedianya media informasi di halte dan belum adanya peralatan mobile NVR (GPS+monitor+ CCTV) ;
			Selama ini pengawasan terhadap pengelolaan angkutan massal di lelang ke Pihak Ketiga'
			Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari Dinas Perhubungan untuk pengawasan operasional angkutan massal perkotaan/umum.
9	Pelayanan sarana angkutan umum darat masih rendah	Tolak ukur kepuasan yang masih kualitatif	Belum terlaksananya survey secara komperhensif terhadap pelayanan angkutan yang diberikan;
10	Konektifitas sistem informasi dan pengawasan lalu lintas dan angkutan yang masih konvensional	Belum tersedianya suatu informasi berbasis teknologi yang memadai sebagai fungsi kontrol dan evaluasi yang mewakili realtime dan aktivitas di lapangan	masih menggunakan sistem semi laporan manual yang berdasarkan periode waktu.
11	Belum optimalnya pelayanan transportasi yang mendukung fungsi kawasan strategis di Aceh	Kewenangan yang terbatas dan keterbatasan anggaran Pemerintah Kab/Kota yang mengelola Bandar Udara di Aceh	Pemerintah Provinsi tidak mempunyai kewenangan Urusan Penerbangan sesuai dengan UU.23 Tahun 2014, sedangkan masih ada beberapa bandara yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota yang perlu pengembangan untuk memenuhi standar pelayanan minimal;
		Pelayanan Tamu VIP pada Bandara Sultan Iskandar Muda belum optimal	Belum ada regulasi terkait dengan pengelolaan Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda.

Dampak permasalahan di atas terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah keterlambatan dalam mencapai indikator kinerja pelayanan perhubungan, khususnya untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintergrasi dan lingkungan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna angkutan umum dan meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Sedangkan dampak dari permasalah terhadap capaian program nasional/internasional (NSPK, SPM, SDGs) khususnya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan, karena keterbatasan kewenangan, Pemerintah provinsi hanya berwenang menyediakan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi.

Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan Aceh dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Secara umum pelayanan sektor Perhubungan Aceh belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hambatan antara lain:

1. Perlu adanya regulasi di daerah dalam pengembangan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan transportasi pelayanan seperti Qanun penyelenggaraan perhubungan, serta berbagai Peraturan lainnya yang menjabarkan secara teknis pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana transportasi;
2. Perlu adanya kejelasan dan ketegasan tentang kepemilikan dan pengelolaan aset baik prasarana, jaringan infrastruktur maupun jaringan pelayanan transportasi di seluruh Aceh sehingga selalu terkendala dalam proses pembahasan anggaran dan proses pengawasan internal;
3. Pengembangan transportasi multimoda yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi umum lainnya khususnya pada kawasan perkotaan dan antarkota, baik pelabuhan (transportasi laut), bandar udara (transportasi udara), serta terminal bus AKDP/AKAP (transportasi darat);
4. Penataan sistem transportasi perkotaan belum dapat mengimbangi perkembangan kebutuhan angkutan umum di perkotaan (feeder dan bus rapid transit);
5. Perkembangan teknologi transportasi yang begitu pesat sehingga mendorong kebutuhan pelayanan sektor transportasi dihadapkan pada berbagai tanggung jawab pemerintah;
6. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Perhubungan ditetapkan untuk mengelola 9 (Sembilan) Terminal Type B, perlu dioperasionalkan sebagai pelayanan sektor publik;
7. Kesadaran masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal masih rendah;
8. Meningkatnya penumpang yang menyeberang ke kepulauan di wilayah Aceh, namun jumlah Kapal Ro-Ro Ke Pulau Weh (Sabang), Pulau Simeuleu (Sinabang) dan Pulau Banyak yang ada saat ini masih sangat terbatas;

9. Tingginya sedimentasi pada kolam pelabuhan Ulee Lheue dan Lamteng sehingga terjadi pendangkalan, berakibat sulitnya manuver kapal saat memasuki kolam pelabuhan, perlu pengerukan secara berkala;
10. Kewenangan Urusan Penerbangan (bandara) dan pengadaan pesawat non-niaga tidak ada pada Pemerintah Provinsi (UU.23/2014), sedangkan masih ada beberapa bandara yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota yang perlu pengembangan untuk memenuhi standar pelayanan minimal;
11. Perlu konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;
12. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur perhubungan yang telah ada untuk menjaga standar pelayanan minimal;
13. Saatnya fokus pada *Bussines Plan* sebagai peran Privatisasi pada sektor Transportasi Aceh;
14. Tingkat prioritas urusan perhubungan di daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di anggap sektor yang tidak langsung menyumbang PAD.

b. Peluang

Ditengah keterbatasan yang ada, pelayanan jasa transportasi, sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk dapat dikembangkan. Secara garis besar peluang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan kewenangan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan transportasi, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kab/Kota, khusus untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Nasional, Menteri Perhubungan telah memberikan kemudahan dalam hal penanganan pada daerah rawan kecelakaan;
2. Adanya upaya penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan infrastruktur perkeretaapian yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya termasuk reaktivasi jalur kereta api oleh Pemerintah Pusat;

3. Telah Terbentuknya UPTD pengelolaan Terminal Type B dan Trans Koetaradja, sehingga diharapkan lebih focus dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan asli daerah;
4. Adanya upaya kerja sama dengan badan usaha/swasta dalam penyediaan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan transportasi, yaitu Usulan Proyek Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha (KPBU) yaitu: LRT Aglomerasi di Ibukota Aceh, Pengadaan unit Kapal Ro-Ro, Pengadaan Kapal Cepat dan Pengadaan *Bus Feeder* dan angkutan massal perkotaan (Trans Koetaradja);
5. Adanya wacana revisi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah khusunya yang mengatur kewenangan penerbangan pada Pemerintah Provinsi;
6. Adanya upaya kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan kajian dalam rangka pengembangan pelayanan transportasi;
7. mengintegrasinya data dan informasi pembangunan melalui Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu).

Dari permasalahan dan peluang di atas, dapat diformulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan layanan angkutan massal perkotaan, perlu tindakan tegas baik dari Forkopimda tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk membatasi penggunaan pribadi dan menyediakan bus khusus karyawan. Setiap instansi perlu membatasi penggunaan mobil pribadi, sehingga selain mengurangi kapasitas parkir yang tersedia, juga mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Hal ini tidak terlepas dengan suguhan layanan yang harus ditingkatkan oleh pengelola angkutan massal perkotaan, sehingga memberikan jaminan kepuasan bagi penumpang yang telah rela meninggalkan kendaraan pribadinya untuk lebih memilih angkutan Trans Koetaradja;
2. Perlu adanya ketegasan dalam kepemilikan asset, sehingga dalam mengusulkan anggaran tidak terbentur dengan kepemilikan asset. Masih banyak asset yang dikelola Pemerintah Kab/Kota tidak mampu dianggarkan dalam pemeliharaan dan pengelolaannya karena keterbatasan angggaran yang diterima. Untuk itu

amanat UU.23 Tahun 2014 harus lebih ditegaskan dalam kepemilikan asset sesuai dengan wewenangnya;

3. Sejak diserahterimakannya Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota, terminal ini menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Aceh dimana untuk merubah image "terminal jorok dan terbengkalai" telah diusulkan peningkatan secara optimal untuk menunjukkan kepada masyarakat Aceh fungsi terminal yang seharusnya dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman seperti di Provinsi lain diluar Aceh. Untuk itu dukungan dari seluruh pihak sangat berarti guna menyatukan visi misi Pemerintah Aceh.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program-program didaerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan Perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada Analisis Gambaran Umum dan Kondisi Daerah serta Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah. Selanjutnya evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang dilanjutkan kepada Proses Perumusan Strategi. Proses perumusan strategi diperlukan mengingat faktor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.

Strategi yang diterapkan dalam bidang Perhubungan Aceh tahun 2017-2022 adalah :

1. Prioritas penuntasan kegiatan terbengkalai;
2. Optimalisasi/ Revitalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi sektor perhubungan;
4. Peningkatan pelayanan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

5. Peningkatan aspek keselamatan menuju *zero accident*;
6. Penetapan kejelasan aset dan kewenangan;
7. Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota;
8. Kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona pengembangan;
9. Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta;
10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah terhadap Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Pemenuhan standar minimal terhadap prasarana dan fasilitas keselamatan.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh akan menyusun program dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.
Review terhadap rancangan akhir RKPA Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.4.

Review ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali usulan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh SKPA untuk memenuhi prioritas kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan untuk pelayanan jasa transportasi, beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan adalah sebagai berikut:

a. Perlu penyesuaian target hasil kegiatan Pengadaan Bus Trans Kutaraja, semula tersedianya bus ukuran medium sebanyak 11 Unit, menjadi 5unit karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Sedangkan jumlah bus yang dibutuhkan sesuai rencana kebutuhan adalah sebanyak 55 unit bus besar dan 32 bus sedang untuk 6 koridor. Sampai dengan saat dokumen rencana kerja ini disusun, bus yang tersedia sebanyak 25 unit bus besar dan 15 bus sedang yang beroperasi pada 4 koridor.

b. Perlu penambahan kegiatan Pengadaan dan Instalasi CCTV dan *Digital Signage Outdoor* pada Halte Trans Kutaraja, Pengadaan dan pemasangan perangkat E-Ticketing system angkutan Massal Trans Kutaraja agar lebih mengotimalkan pelayanan pengguna Trans Kutaraja dan mempersiapan sarana pendukung pembayaran tiket, dimana direncanakan pada tahun 2021 pada koridor I akan mulai berbayar, akan tetapi tetap dengan perhitungan dan kebijakan yang tepat sasaran.

c. Perlu penambahan anggaran untuk lebih mengoptimalkan fungsi Terminal tipe B yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh sejak awal Tahun 2017, disamping proses pengurusan serah terima asset yang masih terus dilakukan, usulan revitalisasi 9 terminal juga sangat diperlukan, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tentu perlu didukung fasilitas yang sangat nyaman, aman dan selamat.

d. Perlu penambahan kegiatan Pembangunan *Break Water* Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh untuk memudahkan manuver kapal pada saat akan sandar dikolam pelabuhan. Akan tetapi pekerjaan break water ini membutuhkan anggaran besar dengan pola kerja satu kesatuan dalam tahun jamak.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur dalam usulan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan menganalisa kebutuhan masyarakat baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota. Dalam perencanaan pembangunan segala aspek harus diperhatikan termasuk salah satunya adalah adanya usulan dari lapisan masyarakat agar pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran dan tepat guna.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat disampaikan bahwa usulan dari Pemerintah Kab/Kota merupakan kegiatan di sektor Perhubungan yang menjadi kewenangan kab/kota dengan menggunakan

sumber dan DOKA, sedangkan usulan dari masyarakat melalui perwakilan rakyat merupakan kegiatan di sektor perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Setiap usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan harus diverifikasi sesuai dengan kewenangan dan mendukung langsung prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2020 dengan melengkapi data dukung teknis.

Usulan kegiatan tersebut harus dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh, yaitu melakukan tugas pembangunan di bidang perhubungan dengan fungsi pelaksanaan dan pengkoordinasian transportasi orang dan barang antar Kabupaten/Kota di dalam wilayah Aceh, khususnya peningkatan pelayanan angkutan darat dan angkutan penyberangan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 2.5.**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah kebijakan umum pembangunan Nasional saat ini masih tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Oleh sebab itu telaah kebijakan terhadap kebijakan Nasional Tahun 2020, hanya baru dapat ditelaah berdasarkan Rancangan Teknoratik RPJMN 2020-2024 dan Pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020.

Arah RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya Struktur Perekenomian yang Kokoh berlandaskan Keunggulan Kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Tema yang diusung pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah "*Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*" yang diurai melalui 5 (lima) prioritas nasional sebagai berikut :

a. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
b. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
c. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
d. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
e. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas dikembangkan menjadi arah kebijakan Pemerintah Aceh, diimplementasikan secara teknis oleh masing-masing SKPA sesuai dengan Tupoksi masing-masing SKPA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Perhubungan Aceh merumuskan suatu tujuan dalam Bidang Perhubungan yaitu untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pilar-pilar utama pada sektor perhubungan darat, laut dan udara. Arah kebijakan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efesien dan berorientasi pada pelanggan. Peranan sumber daya sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan kebijakan di Bidang Perhubungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Aceh yaitu mendukung/berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintah Aceh.

Visi Pemerintah Aceh tahun 2017 – 2022 yaitu : Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

Sedangkan Misi Pemerintah Aceh 2017 – 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan Misi di atas, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Aceh khususnya kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Aceh berpedoman kepada Misi ke-10, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dengan Target indikator kinerja adalah meningkatnya persentase standar pelayanan fasilitas perhubungan dan meningkatnya kepuasan pelayanan angkutan. Untuk itu Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 ini lebih fokus kepada peningkatan fasilitas terminal Type B dan fasilitas pada pelabuhan penyeberangan serta penambahan jumlah sarana angkutan darat dan penyeberangan.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah Dinas Perhubungan sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Aceh adalah:

a. Untuk mewujudkan peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan yang menghubungkan wilayah kepulauan dan Kawasan, maka perlu merencanakan strategi dan kebijakan yang dapat dilaksanakan pada lima tahun kedepan. Strategi dalam meningkatkan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan transportasi maka perlu adanya pengembangan dalam penggunan teknologi informasi yang terdepan untuk menghubungkan wilayah kepulauan, menentukan skema pembiayaan, penetapan kejelasan asset dan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona pengembangan transportasi. Dalam penentuan strategi tersebut, arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan ialah membangun konektivitas transportasi antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan.
b. Untuk mewujudkan Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Terminal Type B perlu penerapan strategi yang optimal. Demi tercapainya standar pelayanan yang modern pada Terminal Type B di Aceh, maka perlu menerapkan pengembangan pelayanan fasilitas berbasis teknologi informasi kajian system informasi manajemen terminal, penerapan pelayanan e-ticketing, e-payment retribusi, aplikasi/website, check point, help point serta adanya kerjasama pengelolaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dimana keterlibatan pihak ketiga sebagai pengelola. Dengan penentuan strategi tersebut, arah kebijakan yang dilakukan DInas Perhubungan ialah meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan yang memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri.
c. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi Trans Koetaradja yang diselenggarakan secara mandiri, maka perlu menyediakan layanan informasi baik pada bus, halte maupun pada calon penumpang. Disamping itu sesuai dengan ketentuan yang yang telah ditetapkan, layanan pada koridor yang load faktor telah mencapai lebih dari 70%, maka perlu dikaji ulang untuk subsidi operasionalnya, sehingga dalam hal ini juga diperlukan perangkat untuk

penerapan e-ticketing. Dalam mengatasi permasalahan pada fasilitas angkutan umum perkotaan yang saat ini beroperasi di Ibukota Provinsi Aceh, Dinas Perhubungan menerapkan strategi dengan menggunakan teknologi informasi serta melakukan pembiayaan yang melibatkan sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility* BUMN. Dengan penentuan strategi tersebut, arah kebijakannya mengarahkan angkutan Transkoetaradja menuju Badan Layanan Umum.

d. Untuk mewujudkan penurunan tingkat Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor energi subsektor transportasi. Dinas Perhubungan menerapkan strategi dengan adanya rancangan perkeretaapian Aceh perkotaan, penciptaan angkutan massal perkotaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah terhadap Emisi Gas Rumah Kaca. Sistem jaringan transportasi di masa yang akan datang diarahkan pada transportasi ramah Lingkungan.
e. Untuk mewujudkan infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan (Komite FAL) maka perlu merencanakan strategi dan kebijakan yang dapat dilaksanakan pada lima tahun kedepan. Strategi dalam meningkatkan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan transportasi maka perlu adanya pengembangan dalam penggunan teknologi informasi yang terdepan, menentukan skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta, penetapan kejelasan asset dan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam penentuan strategi tersebut, arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan ialah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang aman, nyaman dan handal serta meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan.
f. Dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi perlu menerapkan strategi dalam pemenuhan standar minimal terhadap prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas, sehingga dapat diarahkan pada keselamatan transportasi menuju *Zero Accident.*
g. Perencanaan pengembangan suatu bandar udara sebagaimana terdapat dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional saat ini mengedepankan pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi arahan bagi peran, fungsi manfaat

dan hirarki bandar udara. Peran yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh tingkat keterkaitan pengembangan fasilitas layanan bandar udara dengan pengembangan ekonomi wilayah hinterlandnya. Akan tetapi, ketersediaan bandar udara secara nasional di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan peran bagi pengembangan potensi ekonomi wilayah. Dalam Kajian Peran Bandar Udara Maimun Saleh Sabang sebagai pintu gerbang perekonomian wilayah untuk menentukan komoditas unggulan yang paling potensial untuk ekspor melalui pelayanan kargo udara, bahwa kegiatan perikanan merupakan kegiatan basis (*basic activities*) yang memiliki prospek untuk dikembangkan, prediksi potensi ekspor perikanan sebagai volume kargo rencana maka ditentukan tata letak terminal kargo yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam perencanaan tersebut, penentuan strategi dapat membentuk kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona pengembangan sehingga dapat diarahkan pada pengembangan prasarana dan sarana yang berkeadilan.

h. Pengelolaan transportasi antar zona yang memiliki kebutuhan akses internasional adalah fasilitas pelabuhan di zona utara-timur pada terminal penyeberangan Internasional di Pelabuhan Kuala Langsa. Adanya kerjasama Indonesia – Malaysia – Thailand membuka kesempatan yang besar untuk peningkatan kapasitas pelabuhan.

i. Penyediaan sistem jaringan transportasi yang menembus kawasan hutan konservasi/lindung menyebabkan terjadinya benturan dengan arahan fungsi peruntukan ruang bagi perlindungan lingkungan. Agar masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan tidak terisolasi dan dapat meningkat kesejahteraannya maka perlu dibangun jaringan transportasi berkelanjutan dengan mengintegrasikan perencanaan sistem transportasi dengan system perlindungan fungsi kawasan hutan. Transportasi sungai merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan dan potensial untuk dikembangkan secara terintegrasi dengan upaya konservasi kawasan hutan. Pengembangan antar kawasan yang melintasi kawasan hutan, diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur kolaborasi dan penguatan regulasi.

j. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang signifikan setiap tahun menyebabkan terjadinya kemacetan pada ruas jalan raya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Penambahan volume jalan beserta pelayanan yang kian menurun, kebutuhan pembebasan lahan yang akan semakin rumit beserta konflik yang akan terjadi, dan keadaan lingkungan yang tidak stabil. Transportasi umum di Kota Banda Aceh saat ini mempunyai kecenderungan mengalami penurunan jumlah penumpang. Penanganan problema transportasi Kota Banda Aceh saat ini telah berupaya mengoperasikan *Bus Rapid Transit* (BRT) yang dimulai sejak Tahun 2016. Hambatan lalu lintas menjadi suatu kelemahan pengoperasian BRT serta kebutuhan permintaan waktu tempuh yang cepat dan bebas hambatan menjadikan BRT bukan pilihan prioritas masyarakat. Masyarakat masih sangat nyaman dan mudah mengakses suatu tujuan dengan kendaraan pribadi. Dalam hal ini, BRT memiliki kekurangan dalam hal kecepatan dan waktu tempuh jika dibandingkan dengan Kereta api perkotaan. BRT lebih tepat dimanfaatkan sebagai *feeder* bagi angkutan perkotaan.

3.3 Program dan Kegiataan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan selain mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh melalui RPJMA, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penyelanggara urusan pemerintah Aceh di bidang Perhubungan menjadi tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan transportasi kepada Masyarakat. Pencapaian Tujuan Internasional SDGs juga menjadi pertimbangan sehingga setiap kegiatan selain mendukung tujuan provinsi juga mendukungan tujuan nasional dan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Perhubungan Aceh, maka disusun program kerja dengan mengacu pada Qanun RPJMA Tahun 2017-2022 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup 11 Kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, mencakup 11 Kegiatan;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, mencakup 1 Kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, mencakup 2 Kegiatan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, mencakup 17 Kegiatan;
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, mencakup 11 Kegiatan;
7. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, mencakup 42 Kegiatan.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2020 yang diusulkan sesuai dengan Renstra dan rancangan RKPA yang dapat dilihat pada **Lampiran Tabel3.3.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk merumuskan program dan kegiatan, Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh menjadi dasar utama yang juga sesuai Visi dan misi Pemerintah Aceh adalah menjadi bagian dari misi ke-10 yaitu Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Capaian peran Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan *The Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tetap berpedoman pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan ke-3 yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan target 3.6 mengurangi separuh kematian global dan cedera dari kecalakaan jalan lalu lintas. Pada tujuan ini diusulkan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui kegiatan Rambu, Marka, Pagar Pengaman Jalan, Traffic Light, Zona Selamat Sekolah, cermin tikungan dan lampu penerangan jalan;
2. Tujuan ke-9 Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi dengan Target 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Pada tujuan ini diusulkan program Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan melalui kegiatan pembangunan prasarana perhubungan Laut dan Udara;
3. Tujuan ke-11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan dengan Target 11.2 menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua. Pada

tujuan ini diusulkan program Pembangunan sarana, prasarana dan Fasilitas Perhubungan melalui kegiatan Penyediaan sarana perhubungan darat.

Jadi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur prasarana dan sarana perhubungan tetap menjadi fokus dalam rumusan program dan kegiatan rencana kerja Dinas Perhubungan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan transportasi yang tersebar di Lintas Barat Selatan, Tengah dan Utara Timur Provinsi Aceh.
Dalam penyusunan Rancangan Akhir rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan faktor-faktor yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, terkait dengan pendanaan bersumber dari: Pendapatan Asli Aceh (PAA), DBH (Pajak dan Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Migas Aceh, Migas Kabupaten/Kota dan Otonomi Khusus Aceh (Otsus).

4.1 Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Perhubungan Aceh, maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
7. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan program yang telah

ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada. Perlu disampaikan bahwa terdapat 5 kegiatan dari 94 Kegiatan yang tercantum dalam RKPA Tahun 2020, namun karena keterbatasan wewenang dan anggaran sehingga belum ada nilai jabarannya. Untuk merealisasikan program diatas, ditetapkan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
12. Pembangunan Gedung Kantor;
13. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional;
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Meubelair;
17. Pengadaan Komputer;
18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;
21. Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Kelengkapanya;
22. Pendidikan dan pelatihan formal;
23. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
24. Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum;
25. Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik;
26. Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran;

27. Pengaturan Kelancaran lalu Lintas penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
28. Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional;
29. Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah;
30. Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
31. Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan;
32. Pembinaan Bengkel Karoseri;
33. Penertiban Angkutan Umum;
34. Wahana Tata Nugraha;
35. Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin;
36. Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja;
37. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan;
38. Pekan Nasional Keselamatan Jalan;
39. Penyuluhan dan Pemilihan Pelajar Pelopor;
40. Penyuluhan dan Pemilihan Abdiyasa Teladan;
41. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra- Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie – Meulaboh;
42. Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya;
43. Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren;
44. Pengadaan deliniator Pada Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek;
45. Pengadaan traffic light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhosukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan;
46. Pengadaan cermin tikungan Pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Krueng Geukueh Kab. Aceh Utara;

47. Pengadaan lampu penerangan jalan pada daerah rawan kecelakaan Sp. Turu - lutung – Geumpang;
48. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan pada titik keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Trumon – Singkil;
49. Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail/Barier pada lintasan Gayo Lues - Babah Rot;
50. Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail/Barier pada lintasan Lokop - Gayo Lues dan lintasan Pining - Blang Kejeren;
51. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
52. Pengadaan Marka Jalan (Mata Kucing) pada Lintas Jalan Kabupaten Aceh Barat - Nagan Raya;
53. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyeberangan Sibigo;
54. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sibigo;
55. Rencana Induk Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh;
56. Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi;
57. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan;
58. Pemeliharaan SBNP;
59. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak);
60. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak);
61. Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak);
62. Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan;
63. Pengadaan Bus Trans Kutaraja;
64. Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja;
65. Pembangunan Halte Trans Kutaraja;
66. Pengadaan Halte Portable;
67. Pengadaan dan Instalasi CCTV dan *Digital Signage Outdoor* pada Halte Trans Kutaraja;

68. Pengadaan dan pemasangan perangkat *E-Ticketing system* angkutan Massal Trans Kutaraja;
69. Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja;
70. Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja;
71. Pemeliharaan *Digital Signage* pada Halte Trans Kutaraja;
72. Pemeliharaan aksessoris interior dan eksterior Bus Trans Kutaraja;
73. Penyelenggaraan Terminal Tipe B;
74. Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie;
75. Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie Jaya;
76. Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen;
77. Revitalisasi Terminal Tipe B Kuala Simpang;
78. Revitalisasi Terminal Tipe B Calang;
79. Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Pidie;
80. Revitalisasi Terminal Tipe B Singkil;
81. Pemeliharaan Gedung *Very Important Person* (VIP) Bandara SIM;
82. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan;
83. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Migas Kabupaten/Kota);
84. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (Migas Kabupaten/Kota);
85. Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan (Migas Kabupaten/Kota);
86. Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues;
87. Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil;
88. DED Pembangunan Dermaga Tambat di Kepulauan Kab. Aceh Singkil;
89. Peningkatan fasisilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak;
90. Pembebasan Lahan Pengemb. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang;
91. Pembebasan Lahan Perluasan Bandara Lasikin;
92. Rehabilitasi *Causeway* dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
93. Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Bubon;
94. Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Singkil.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perhubungan Aceh merupakan finalisasi jabaran dari RKPA Tahun 2020. Program dan kegiatan di tahun 2020 tetap mengacu kepada Kebijakan Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh yaitu memperkecil disparitas antar wilayah serta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya pembenahan implementasi perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan Aceh namun tetap berupaya menuntaskan kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara berkala. Diharapkan dengan kegiatan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja jaringan transportasi.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 – 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir rencana kerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2020 harus menerapkan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perhubungan Aceh diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Aceh di tahun berjalan 2019 dan perencanaan strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2020 serta menetapkan berbagai kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Aceh saat ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan

pembangunan daerah yang akuntabel, partisipasif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.

Proses penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down, teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Yang perlu mendapat perhatian dalam renja ini adalah setiap kegiatan harus sesuai dengan prosedur dan kaidah serta peraturan yang berlaku, sehingga dari tahapan perencanaan sampai tahapan pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik. Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil–hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat. Selanjutnya semoga hasil dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang lebih konkrit dan realitas.

Banda Aceh, Juli 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

JUNAIDI, ST, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19631231 199703 1 014

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
PROVINSI ACEH

SKPA : Dinas Perhubungan Aceh

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja SKPA Tahun 2018	Realisasi Renja SKPA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**BELANJA TIDAK LANSUNG**			**20.510.540.394**	**16.264.377.228**	**79,30**			
1				**Gaji dan Tunjangan (DAU)**								
1				**Tambahan penghasilan PNS (PAA)**								
02				**Wajib Non Pelayanan Dasar**								
02				**Perhubungan**								
02				**Dinas Perhubungan Aceh**								
1	**01**	**01**		**1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**21,10%**		**9.591.516.262,0**	**7.702.321.910,0**	**80,30**			
1	01	01	01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 %	26.000.000	19.465.500	74,87	100 %	100 %	100 %
1	01	01	02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		57,36 %	2.638.524.082	1.398.159.005	52,99	100 %	100 %	100 %
1	01	01	08	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor		83,6 %	829.473.225	739.403.000	89,14	100 %	100 %	100 %
1	01	01	10	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor		100 %	507.074.705	506.052.000	99,80	100 %	100 %	100 %
1	01	01	11	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		99,93 %	359.118.750	350.939.900	97,72	100 %	100 %	100 %
1	01	01	12	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		99,99 %	93.261.850	92.919.000	99,63	100 %	100 %	100 %
1	01	01	13	7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		88,69 %	469.740.000	435.708.100	92,76	100 %	100 %	100 %
1	01	01	15	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		86,03 %	21.294.000	14.190.000	66,64	100 %	100 %	100 %
1	01	01	17	9 Penyediaan makanan dan minuman		98,28 %	373.309.650	373.228.500	99,98	100 %	100 %	100 %
1	01	01	18	10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		98,76 %	759.150.000	755.688.808	99,54	100 %	100 %	100 %
1	01	01	22	11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		90,54 %	3.514.570.000	3.016.568.097	85,83	100 %	100 %	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja SKPA Tahun 2018	Realisasi Renja SKPA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**01**	**02**		**2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**7,52%**		**4.006.120.878,0**	**3.657.282.500,0**	**91,29**			
1	01	02	07	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		96,6 %	257.710.000	230.753.000	89,54	100 %	100 %	100 %
1	01	02	09	4. Pengadaan Peralatan Gedung kantor		99,75 %	391.487.000	390.808.000	99,83	100 %	100 %	100 %
1	01	02	10	5. Pengadaan Mebeleur		100 %	269.717.832	269.490.000	99,92	100 %	100 %	100 %
1	01	02	13	6. Pengadaan Komputer		98,8 %	289.450.000	288.631.000	99,72	100 %	100 %	100 %
1	01	02	22	7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		99,92 %	804.083.736	788.139.000	98,02	100 %	100 %	100 %
1	01	02	24	10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		96,06 %	1.413.218.150	1.109.269.710	78,49	100 %	100 %	100 %
1	01	02	28	11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		99,9 %	523.774.160	523.759.790	100,00	100 %	100 %	100 %
1	01	02	29	12 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur		99,89 %	37.180.000	37.032.000	99,60	100 %	100 %	100 %
1	01	02	36	13 Pemeliharaan rutin / berkala sound system		99,95 %	19.500.000	19.400.000	99,49	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**03**		**3. Peningkatan Disiplin Aparatur**	**1,08%**		**11.900.000,0**	**11.880.000,0**	**99,83**			
1	01	03	02	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		99,84 %	11.900.000	11.880.000	99,83	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**05**		**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**11,72%**		**961.500.000,0**	**684.910.709,0**	**71,23**			
1	01	05	01	1. Pendidikan dan pelatihan formal		64,1 %	961.500.000	684.910.709	71,23	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**15**		**5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**76,91%**		**125.603.115.186**	**73.434.621.906**	**58,47**			
1	01	15	01	1. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		84,14 %	11.995.042.302	9.321.372.646	77,71	100 %	100 %	100 %
			02	2. Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat		0 %	7.355.500.000	7.088.626.402	96,37	100 %	100 %	100 %
				3. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan		0 %	14.395.130.000	6.005.707.653	41,72	100 %	100 %	100 %
				4. Pembangunan Gedung Terminal		0 %	1.333.080.000	1.297.570.871	97,34	100 %	100 %	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja SKPA Tahun 2018	Realisasi Renja SKPA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				6. Pembangunan Prasarana Perhubungan udara		0 %	77.468.042.884	40.126.948.115	51,80	100 %	100 %	100 %
				7. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan		0 %	8.410.200.000	8.355.468.826	99,35	100 %	100 %	100 %
				8. Penyediaan sarana perhubungan udara		0 %	4.646.120.000	1.238.927.393	26,67	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**17**		**7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**9,87%**		**13.217.056.000**	**11.288.310.075**	**85,41**			
				1. Kegiatan Temu Wicara Pengusaha Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang		0 %	92.980.000	90.700.000	97,55	100 %	100 %	100 %
1	01	17	10	3. Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah		98,74 %	13.124.076.000	11.197.610.075	85,32	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**18**		**8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**592,58%**		**7.386.503.800**	**6.759.644.428**	**91,51**			
1	01	18	05	2. Pembangunan sarana perhubungan laut		99,51 %	7.386.503.800	6.759.644.428	91,51	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**19**		**9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**32,82%**		**43.611.110.338**	**41.695.845.155**	**95,61**			
1	01	19	01	1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas		99,52 %	15.976.114.338	15.413.257.456	96,48	100 %	100 %	100 %
1	01	19	02	2. Pengadaan marka jalan		99,97 %	5.870.896.000	5.546.906.006	94,48	100 %	100 %	100 %
1	01	19	03	3. Pengadaan pagar pengaman jalan		99,29 %	7.001.700.000	6.647.052.404	94,93	100 %	100 %	100 %
1	01	19	04	4. Pengadaan Deliniator		100 %	2.471.600.000	2.319.320.000	93,84	100 %	100 %	100 %
1	01	19	05	5. Pengadaan Traffic Light		99,98 %	9.166.200.000	8.793.175.343	95,93	100 %	100 %	100 %
1	01	19	07	6. Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan		100 %	3.124.600.000	2.976.133.946	95,25	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**20**		**9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**100,00%**		**3.545.500.000**	**3.521.197.036**	**99,31**			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja SKPA Tahun 2018	Realisasi Renja SKPA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	01	20	001	1. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor		- %	3.545.500.000	3.521.197.036	99,31	100 %	100 %	100 %
1	**01**	**18**		**10. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**0,00%**		**0**	**0**	**0,00**			

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Perhubungan Aceh

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja SKPA				Realiasasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Realisasi s/d Juli Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Jumlah arus penumpang angkutan umum**		IKK									
	Angkutan Darat			3.887	3.969	4.058	4.158	3.819	2.579	4.058	4.158	
	Angkutan Laut			3.468	3.830	4.022	4.223	5.561	2.559	4.022	4.223	
	Angkutan Udara			12.627	13.890	15.279	16.806	13.667	4.185	15.279	16.806	
2	**Rasio ijin trayek**		IKK	1 : 1363	1 : 1360	1 : 1355	1 : 1346	1 : 1.307	1 : 761	1 : 1355	1 : 1346	
3	**Jumlah uji kir angkutan umum**		IKK	45.887	64.241	89.938	125.913	27.539	3.508	89.938	125.913	
4	**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**		IKK									
	Jumlah Pelabuhan Laut			11	11	11	11	11	11	11	11	
	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan			8	8	8	8	8	8	8	8	
	Jumlah Bandar Udara			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Terminal Tipe B			9	9	9	9	9	9	9	9	
	Jumlah Terminal Tipe C			23	23	23	23	23	23	23	23	
	Jumlah Terminal Tipe B yang Fungsional			78	89	100	100	56	56	100	100	
5	**Persentase layanan angkutan darat**			73,89	74,13	74,51	74,29	387,187	111,906	74,51	74,29	
6	**Persentase kepemilikan KIR angkutan umum**			21,74	30,35	42,36	59,13	13,05	2,000	42,36	59,13	
7	**Pemasangan Rambu-rambu**			70	76	81	87	70	40	81	87	
5	**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum**		IKK									
	Angkutan Darat			13.994.146	14.394.773	14.670.866	14.954.706	1.157.744	368.633	14.670.866	14.954.706	
	Angkutan Laut			620.201	651.211	683.772	717.961	889.329	430.699	683.772	717.961	
	Angkutan Udara			559.007	614.907	676.398	744.038	776.330	269.831	676.398	744.038	
6	**Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**		IKK									
	Terminal			4.897.951	5.182.118	5.281.512	5.533.241	2.140.197	601.114	5.281.512	5.533.241	
	Bandara			1.275.869	1.403.456	1.543.802	1.698.182	1.411.379	465.864	1.543.802	1.698.182	
	Dermaga			1.217.868	1.278.761	1.342.699	1.409.834	1.778.668	861.339	1.342.699	1.409.834	
7	**Jumlah kecelakaan lalu lintas**	SPM		2.300	2.100	1.900	1.700	2.176	1.843	1.900	1.700	

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2020
PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : DINAS PERHUBUNGAN ACEH

No	RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
A	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**										
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Aceh	Terlaksananya pengiriman Surat-Surat dan Paket Kedinasan	1 Tahun	56.436.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Aceh	Terlaksananya pengiriman Surat-Surat dan Paket Kedinasan	1 Tahun	56.436.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Aceh	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	2.300.569.816	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Aceh	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	2.300.569.816	
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi Aceh	Tercipta lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 bulan	1.001.760.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi Aceh	Tercipta lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 bulan	1.001.760.000	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional perkantoran	12 bulan	653.400.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional perkantoran	12 bulan	653.400.000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Aceh	Tersedianya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	12 bulan	470.800.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Aceh	Tersedianya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	12 bulan	470.800.000	
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya alat - alat listrik dan elektronik	12 bulan	149.688.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya alat - alat listrik dan elektronik	12 bulan	149.688.000	
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya dana untuk pengadaan peralatan perlengkapan kantor	12 bulan	947.429.478	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya dana untuk pengadaan peralatan perlengkapan kantor	12 bulan	947.429.478	
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Aceh	Tersedianya bacaan (media massa)	12 bulan	590.841.660	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Aceh	Tersedianya bacaan (media massa)	12 bulan	590.841.660	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi Aceh	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 bulan	620.115.000	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi Aceh	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 bulan	620.115.000	
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi Aceh	Biaya perjalanan dinas	12 bulan	1.324.772.500	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi Aceh	Biaya perjalanan dinas	12 bulan	1.324.772.500	
11.	Peningkatan pelayanan jasa perkantoran	Provinsi Aceh	Pembayaran honorarium Tim/ Pejabat/ Peneliti/ Pemeriksa, Tenaga Kontrak	12 bulan	3.885.172.000	Peningkatan pelayanan jasa perkantoran	Provinsi Aceh	Pembayaran honorarium Tim SIPKD, Pejabat Pengadaan, Pemeriksa Barang, PPTK, Peneliti Aset, Tenaga Kontrak	12 bulan	3.885.172.000	
B	**Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**										
1.	Pembangunan gedung kantor	Provinsi Aceh	Pembangunan gedung kantor untuk kelancaran pelayanan publik	80%	8.612.593.062	Pembangunan gedung kantor	Provinsi Aceh	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana dinas	80%	8.612.593.062	
2.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Aceh	Tersedianya Kendaraan operasional Dinas	80%	1.498.021.800	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Aceh	tersedianya kendaraan operasional kantor	80%	1.498.021.800	
3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya dana untuk pengadaan fasilitas perlengkapan kantor	80%	312.276.884	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Aceh	tersedianya perlengkapan kerja yang representatif	80%	312.276.884	
4.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya alat-alat untuk kelancaran kerja	80%	1.691.097.313	Pengadaan peralatan gedung kantor	Provinsi Aceh	tersedianya peralatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran	80%	1.691.097.313	
5.	Pengadaan Meubeulair	Provinsi Aceh	Tersedianya meubeulair pendukung kerja	80%	700.611.268	Pengadaan Meubeulair	Provinsi Aceh	tersedianya peralatan dan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran	80%	700.611.268	
6.	Pengadaan Komputer	Provinsi Aceh	Tersedianya perangkat komputer dan studio untuk operasional	80%	938.185.303	Pengadaan Komputer	Provinsi Aceh	tersedianya perangkat komputer dan studio untuk operasional	80%	938.185.303	
7.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Aceh	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas prasarana kantor	80%	961.503.423	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Aceh	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas prasarana kantor	80%	961.503.423	
8.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Aceh	Jumlah kendaraan bermotor yang siap pakai	80%	1.327.427.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Aceh	Tersedianya biaya perawatan kendaraan bermotor	80%	1.327.427.000	
9.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi Aceh	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas peralatan gedung kantor	80%	853.251.241	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Provinsi Aceh	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas peralatan gedung kantor	80%	853.251.241	
10.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair	Provinsi Aceh	Persentase jumlah meubeulair yang terawat	80%	45.100.000	Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair	Provinsi Aceh	Tersedianya biaya perawatan meubeleur	80%	45.100.000	
11.	Pemeliharaan rutin/berkala sound system	Provinsi Aceh	Persentase sound system yang siap pakai	80%	22.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala sound system	Provinsi Aceh	Tersedianya biaya perawatan sound system	80%	22.000.000	

No	RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
C	**Peningkatan Disiplin Aparatur**										
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Aceh	Tersedianya kelengkapan aparatur dalam pelayanan publik	80%	350.107.560	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Aceh	Tersedianya dana kelengkapan aparatur dalam pelayanan publik	80%	350.107.560	
D	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi Aceh	Jumlah SDM yang dihasilkan	80%	872.976.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi Aceh	Tersedianya dana untuk pengembangan SDM	80%	872.976.000	
2.	Pendidikan dan pelatihan teknis	Provinsi Aceh	Jumlah SDM Teknis yang dihasilkan	80%	547.203.000	Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Aceh	Aparatur yang semakin cakap, terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas teknis	80%	547.203.000	
A	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**										
1.	Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	337.936.099	Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	337.936.099	
2.	Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	115.530.201	Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	115.530.201	
3.	Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	691.318.701	Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	691.318.701	
4.	Pengaturan Kelancaran lalu Lintas penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Provinsi Aceh	Terlaksananya pengaturan kelancaran lalu lintas penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi haji	1 Kegiatan	93.342.584	Pengaturan Kelancaran lalu Lintas penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Provinsi Aceh	Terlaksananya pengaturan kelancaran lalu lintas penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi haji	1 Kegiatan	93.342.584	
5.	Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional	Provinsi Aceh	Terselenggaranya transportasi publik untuk event daerah, nasional maupun internasional	8 Kegiatan	599.754.400	Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional	Provinsi Aceh	Terselenggaranya transportasi publik untuk event daerah, nasional maupun internasional	8 Kegiatan	599.754.400	
6.	Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya pelayanan transportasi tamu negara/daerah	8 Kegiatan	599.190.400	Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya pelayanan transportasi tamu negara/daerah	8 Kegiatan	599.190.400	
7.	Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Provinsi Aceh	Tertanganinya stagnasi angkutan pada kondisi tanggap darurat bencana	1 Kegiatan	154.960.012	Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Provinsi Aceh	Tertanganinya stagnasi angkutan pada kondisi tanggap darurat bencana	1 Kegiatan	154.960.012	
8.	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan	Provinsi Aceh	Tersedianya perencanaan pembangunan fasilitas disabilitas pada angkutan massal perkotaan	1 Dokumen	249.925.787	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan	Provinsi Aceh	Tersedianya perencanaan pembangunan fasilitas disabilitas pada angkutan massal perkotaan	1 Dokumen	249.925.787	
9.	Pembinaan Bengkel Karoseri	Provinsi Aceh	Telaksananya pembinaan terhadap bengkel karoseri	1 Kegiatan	224.151.844	Pembinaan Bengkel Karoseri	Provinsi Aceh	Telaksananya pembinaan terhadap bengkel karoseri	1 Kegiatan	224.151.844	
10.	Penertiban Angkutan Umum	Provinsi Aceh	Terlaksananya penertiban angkutan umum (razia)	10 Kegiatan	309.780.540	Penertiban Angkutan Umum	Provinsi Aceh	Terlaksananya penertiban angkutan umum (razia)	10 Kegiatan	309.780.540	
11.	Wahana Tata Nugraha	Provinsi Aceh	Terlaksananya kegiatan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan	299.446.660	Wahana Tata Nugraha	Provinsi Aceh	Terlaksananya kegiatan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan	299.446.660	
12.	Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin	Provinsi Aceh	Telaksananya koordinasi pelaksanaan andalalin	1 Forum	109.881.796	Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin	Provinsi Aceh	Telaksananya koordinasi pelaksanaan andalalin	1 Forum	109.881.796	
13.	Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terbinanya awak angkutan massal Trans Kutaraja	1 Kegiatan	550.015.315	Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terbinanya awak angkutan massal Trans Kutaraja	1 Kegiatan	550.015.315	
14.	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan transportasi Jalan	1 Kegiatan	33.292.500	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan transportasi Jalan	1 Kegiatan	33.292.500	
15.	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1 Kegiatan	414.928.864	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1 Kegiatan	414.928.864	
16.	Penyuluhan dan Pemilihan Pelajar Pelopor	Provinsi Aceh	Terlaksananya Penyuluhan dan pemilihan pelajar pelopor	1 Kegiatan	170.917.391	Penyuluhan dan Pemilihan Pelajar Pelopor	Provinsi Aceh	Terlaksananya Penyuluhan dan pemilihan pelajar pelopor	1 Kegiatan	170.917.391	
17.	Penyuluhan dan Pemilihan Abdiyasa Teladan	Provinsi Aceh	Terlaksananya penyuluhan dan pemilihan Abdiyasa teladan	1 Kegiatan	173.707.937	Penyuluhan dan Pemilihan Abdiyasa Teladan	Provinsi Aceh	Terlaksananya penyuluhan dan pemilihan Abdiyasa teladan	1 Kegiatan	173.707.937	

No	RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
B	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**										
1.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra- Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie - Meulaboh	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	5 Lokasi	999.945.706	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra- Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie - Meulaboh	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	5 Lokasi	999.945.706	
2.	Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	3 Lokasi	974.965.684	Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	3 Lokasi	974.965.684	
3.	Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Pining- Blangkejeren	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	3 Lokasi	969.693.133	Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Pining- Blangkejeren	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	3 Lokasi	969.693.133	
4.	Pengadaan deliniator Pada Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	2 Lokasi	649.570.004	Pengadaan deliniator Pada Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	2 Lokasi	649.570.004	
5.	Pengadaan traffic light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhosukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	4 Lokasi	1.843.549.800	Pengadaan traffic light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhosukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	4 Lokasi	1.843.549.800	
6.	Pengadaan cermin tikungan Pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Krueng Geukueh Kab. Aceh Utara	Provinsi Aceh	Terpasangnya Cermin Tikungan untuk Memandu Pengguna Jalan	2 Lokasi	548.320.044	Pengadaan cermin tikungan Pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Krueng Geukueh Kab. Aceh Utara	Provinsi Aceh	Terpasangnya Cermin Tikungan untuk Memandu Pengguna Jalan	2 Lokasi	548.320.044	
7.	Pengadaan lampu penerangan jalan pada daerah rawan kecelakaan Sp. Turu - lutung - geumpang	Provinsi Aceh	Tersedianya Penerangan yang Cukup pada Terminal dan Daerah Rawan Kecelakaan	2 Lokasi	-	Pengadaan lampu penerangan jalan pada daerah rawan kecelakaan Sp. Turu - lutung - geumpang	Provinsi Aceh	Tersedianya Penerangan yang Cukup pada Terminal dan Daerah Rawan Kecelakaan	2 Lokasi	900.000.000	
8.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan pada titik keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Trumon - Singkil	Provinsi Aceh	Tersedianya Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi Aceh dan Daerah Rawan Kecelakaan di Provinsi Aceh	2 Lokasi	399.997.480	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan pada titik keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Trumon - Singkil	Provinsi Aceh	Tersedianya Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi Aceh dan Daerah Rawan Kecelakaan di Provinsi Aceh	2 Lokasi	399.997.480	
9.	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Gayo Lues - Babah Rot	Provinsi Aceh	Tersedianya Pagar Pengaman Jalan di ruas Jalan Provinsi	2 Lokasi	2.075.966.767	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Gayo Lues - Babah Rot	Provinsi Aceh	Tersedianya Pagar Pengaman Jalan di ruas Jalan Provinsi	2 Lokasi	2.075.966.767	
10.	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Lokop - Gayo Lues dan lintasan Pining - Blang Kejeren	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	1 Ruas	2.032.752.384	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Lokop - Gayo Lues dan lintasan Pining - Blang Kejeren	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	1 Ruas	2.032.752.384	
11.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Provinsi Aceh			501.363.923	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan		501.363.923	
12.	Pengadaan Marka Jalan (Mata Kucing) pada Lintas Jalan Kabupaten Aceh Barat - Nagan Raya	Provinsi Aceh			-	Pengadaan Marka Jalan (Mata Kucing) pada Lintas Jalan Kabupaten Aceh Barat - Nagan Raya	Provinsi Aceh			-	
C	**Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**										
1.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Provinsi Aceh	Tersedianya DLH Pelabuhan penyeberangan Sibigo	1 Dokumen	1.199.993.557	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Provinsi Aceh	Tersedianya DLH Pelabuhan penyeberangan Sibigo	1 Dokumen	1.199.993.557	
2.	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Provinsi Aceh	Tersedianya RIP Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Provinsi Aceh	Tersedianya RIP Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	1 Dokumen	2.000.000.000	
3.	Rencana Induk Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	Tersedianya RI Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi	1 Dokumen	1.099.931.311	Rencana Induk Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	Tersedianya RI Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi	1 Dokumen	1.099.931.311	
4.	Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi	Provinsi Aceh	Terciptanya Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan pengembangan moda transportasi	1 Kali; 2 Kali	1.050.377.184	Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi	Provinsi Aceh	Terciptanya Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan pengembangan moda transportasi	1 Kali; 2 Kali	1.050.377.184	
5.	Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan	Provinsi Aceh	Tersedianya regulasi di bidang perhubungan	6 Ranpergub	749.787.500	Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan	Provinsi Aceh	Tersedianya regulasi di bidang perhubungan	6 Ranpergub	749.787.500	
6.	Pemeliharaan SBNP	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pemiliharaan SBNP	7 Lokasi 05 Unit	300.916.000	Pemeliharaan SBNP	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pemiliharaan SBNP	7 Lokasi 05 Unit	300.916.000	

No	RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
7.	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak)	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Kapal; 1 Lintasan	42.510.000.000	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak)	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Kapal; 1 Lintasan	42.510.000.000	
8.	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak)	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Kapal; 1 Lintasan	34.001.000.000	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak)	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Kapal; 1 Lintasan	34.001.000.000	
9.	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak)	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Kapal; 1 Lintasa	22.679.725.000	Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak)	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Kapal; 1 Lintasa	22.679.725.000	
10.	Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan	Provinsi Aceh	Terselenggaranya pengawasan pelayanan angkutan perairan	1 Tahun	2.279.600.087	Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan	Provinsi Aceh	Terselenggaranya pengawasan pelayanan angkutan perairan	1 Tahun	2.279.600.087	
11.	Pengadaan Bus Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	5 unit	5.073.692.700	Pengadaan Bus Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	14 unit	11.050.000.000	
12	Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	13.773.090.483	Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	13.773.090.483	
13.	Pembangunan Halte Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	3.878.958.220	Pembangunan Halte Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	3.878.958.220	
14.	Pengadaan Halte Portable	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	387.890.061	Pengadaan Halte Portable	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	387.890.061	
15.	Pengadaan dan Instalasi CCTV dan Digital Signage Outdoor pada Halte Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	-	Pengadaan dan Instalasi CCTV dan Digital Signage Outdoor pada Halte Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	2.500.000.000	
16.	Pengadaan dan pemasangan perangkat E-Ticketing system angkutan Massal Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	-	Pengadaan dan pemasangan perangkat E-Ticketing system angkutan Massal Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	4.100.000.000	
17.	Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	199.786.400	Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	199.786.400	
18.	Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	1.349.301.057	Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	1.349.301.057	
19.	Pemeliharaan Digital Sigange pada Halte Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	50.000.000	Pemeliharaan Digital Sigange pada Halte Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	50.000.000	
20.	Pemeliharaan aksessoris interior dan eksterior Bus Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	242.000.000	Pemeliharaan aksessoris interior dan eksterior Bus Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	242.000.000	
21	Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Provinsi Aceh	Terlaksananya Penyelenggaraan Terminal Tipe B	12 Bulan	917.282.427	Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Provinsi Aceh	Terlaksananya Penyelenggaraan Terminal Tipe B	12 Bulan	917.282.427	
22.	Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi Terminal tipe B	1 Terminal	10.105.110.951	Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi Terminal tipe B	1 Terminal	10.105.110.951	
23	Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie Jaya	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi Terminal tipe B	1 Terminal	-	Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie Jaya	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi Terminal tipe B	1 Terminal	6.623.000.000	
24.	Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	12.969.194.922	Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	12.969.194.922	
25.	Revitalisasi Terminal Tipe B Kuala Simpang	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	2.268.502.635	Revitalisasi Terminal Tipe B Kuala Simpang	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	2.268.502.635	
26.	Revitalisasi Terminal Tipe B Calang	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	1.826.586.300	Revitalisasi Terminal Tipe B Calang	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	1.826.586.300	
27.	Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Pidie	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	4.697.559.438	Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Pidie	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	4.697.559.438	
28.	Revitalisasi Terminal Tipe B Singkil	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	570.463.300	Revitalisasi Terminal Tipe B Singkil	Provinsi Aceh	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	1 Terminal	570.463.300	

No	RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
29.	Pemeliharaan Gedung VIP Bandara SIM	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	1.732.052.093	Pemeliharaan Gedung VIP Bandara SIM	Provinsi Aceh	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	12 Bulan	1.732.052.093	
30.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Provinsi Aceh	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan	12 Bulan	1.128.980.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Provinsi Aceh	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan	12 Bulan	1.128.980.000	
31.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Migas Kabupaten/Kota)	Provinsi Aceh	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buang	1 Set	262.781.750	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Migas Kabupaten/Kota)	Provinsi Aceh	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buang	1 Set	262.781.750	
32.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (Migas Kabupaten/Kota)	Provinsi Aceh	Meningkatnya Pengelolaan Tempat Parkir Angkutan Barang	0,74	3.500.435.932	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (Migas Kabupaten/Kota)	Provinsi Aceh	Meningkatnya Pengelolaan Tempat Parkir Angkutan Barang	0,74	3.500.435.932	
33.	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan (Migas Kabupaten/Kota)	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pengurusan pengujian kendaraan bermotor	1 Lokasi	137.297.497	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan (Migas Kabupaten/Kota)	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pengurusan pengujian kendaraan bermotor	1 Lokasi	137.297.497	
34.	Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues	Provinsi Aceh			2.166.201.499	Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana Bandara	1 Bandara	2.166.201.499	
35.	Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil	Provinsi Aceh	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	1 Kepulauan	500.802.776	Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil	Provinsi Aceh	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	1 Kepulauan	500.802.776	
36.	DED Pembangunan Dermaga Tambat di Kepulauan Kab. Aceh Singkil	Provinsi Aceh	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	1 Kepulauan	1.454.617.300	DED Pembangunan Dermaga Tambat di Kepulauan Kab. Aceh Singkil	Provinsi Aceh	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	1 Kepulauan	1.454.617.300	
37.	Peningkatan fasisilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	22.533.070.670	Peningkatan fasisilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	22.533.070.670	
38.	Pembebasan Lahan Pengemb. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan dan pengembangan prasarana pelabuhan	1 Kegiatan	2.000.353.900	Pembebasan Lahan Pengemb. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan dan pengembangan prasarana pelabuhan	1 Kegiatan	2.000.353.900	
39.	Pembebasan Lahan Perluasan Bandara Lasikin	Provinsi Aceh			1.040.450.000	Pembebasan Lahan Perluasan Bandara Lasikin	Provinsi Aceh	Tersedianya lahan untuk perluasan Bandara	1 Bandara	1.040.450.000	
40.	Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	2.637.047.000	Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	2.637.047.000	
41.	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Bubon	Provinsi Aceh			2.182.423.153	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Bubon	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	2.182.423.153	
42.	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Singkil	Provinsi Aceh			2.182.423.153	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Singkil	Provinsi Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	2.182.423.153	
43.	-	-	-	-	-	Pembangunan Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh (Kontrak Tahun Jamak)	Aceh Barat	Terbangunnya break water pada kolam pelabuhan	1 Pelabuhan	145.000.000.000	
44.	-	-	-	-	-	Pembangunan Pengaman Talud Kolam Dermaga Tambat Desa Lamerem	Simeulue	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	1.500.000.000	
45.	-	-	-	-	-	Pembangunan Halte Trans Kutaraja Koridor 6 (Kota - Syiah Kuala)	Banda Aceh	Terbangunnya Prasarana Angkutan Massal	10 Halte	2.800.000.000	
47.	-	-	-	-	-	Pembangunan Separator dan Marka lajur (Bus way) Trans Kutaraja	Banda Aceh	Terciptanya peningkatan prasarana Angkutan Massal	2 Koridor	5.000.000.000	
46.	-	-	-	-	-	Revitalisasi Bandara SIM untuk mendukung Centre Of Umrah	Aceh Besar	Terciptanya peningkatan prasarana Bandara	1 Bandara	1.500.000.000	
					254.497.230.520					**432.396.537.820**	

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTIGAN/MASYARAKAT TAHUN 2020

PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Perhubungan Aceh

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
A	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**				
1	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan pada titik keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Trumon - Singkil	Provinsi Aceh	Tersedianya Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi Aceh dan Daerah Rawan Kecelakaan di Provinsi Aceh	2 Lokasi	Hanya dapat dipasang pada Jalan Provinsi
2	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Gayo Lues - Babah Rot	Provinsi Aceh	Tersedianya Pagar Pengaman Jalan di ruas Jalan Provinsi	2 Lokasi	Hanya dapat dipasang pada Jalan Provinsi
3	Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail/ Barier pada lintasan Lokop - Gayo Lues dan lintasan Pining - Blang Kejeren	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	1 Ruas	Hanya dapat dipasang pada Jalan Provinsi
4	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	1 Lokasi	Status Jalan Kabupaten
5	Pengadaan Marka Jalan (Mata Kucing) pada Lintas Jalan Kabupaten Aceh Barat - Nagan Raya	Provinsi Aceh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	1 Lintas	Status Jalan Nasional
B	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**				
1	Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues	Kab. Gayo Lues	Terciptanya peningkatan prasarana Bandara	1 Bandara	Usulan Pemerintah Kab. Gayo Lues
2	Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	1 Kepulauan	Usulan Pemerintah Kab. Singkil
3	DED Pembangunan Dermaga Tambat di Kepulauan Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil	Tersedianya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	1 Kepulauan	Usulan Pemerintah Kab. Singkil
4	Peningkatan fasisilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak	Kab. Aceh Singkil	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	untuk pelayanan kepada masyarakat
5	Pembebasan Lahan Pengemb. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang	Kab. Simeulue	Terciptanya peningkatan dan pengembangan prasarana pelabuhan	1 Kegiatan	Usulan Pemerintah Kab. Simeulue
6	Pembebasan Lahan Perluasan Bandara Lasikin	Kab. Simeulue	Tersedianya lahan untuk peningkatan Bandara	1 Bandara	Usulan Pemerintah Kab. Simeulue
7	Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	untuk pelayanan kepada masyarakat
8	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Bubon	Kab. Aceh Barat	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	untuk pelayanan kepada masyarakat
9	Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Singkil	Kab. Aceh Singkil	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	1 Pelabuhan	untuk pelayanan kepada masyarakat

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI ACEH

SKPA : Dinas Perhubungan Aceh

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9
000.	**00**	**5**	**1**				**BELANJA TIDAK LANSUNG**				**21.806.540.394**			**22.896.867.414**
000.	**00**	**5**	**1**	**1**	**01**		**Gaji dan Tunjangan (DAU)**				**12.800.381.084**			**13.440.400.138**
000.	**00**	**5**	**1**	**1**	**02**		**Tambahan penghasilan PNS (PAA)**				**9.006.159.310**			**9.456.467.276**
0.00.							**Wajib Non Pelayanan Dasar**							
0.00.	**00**						**Perhubungan**							
1	**02**	**09**	**01**				**Dinas Perhubungan Aceh**							
5	**2**						**BELANJA TIDAK LANSUNG**				**254.497.230.520**			**267.222.092.050**
		1	**02**	**09**	**01**		**1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**12.000.984.454**			**12.601.033.677**
0.00.	00	1	02	09	01	001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman Surat-Surat dan Paket Kedinasan	Provinsi Aceh	1 Tahun	56.436.000			59.257.800
0.00.	00	1	02	09	01	002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Provinsi Aceh	12 bulan	2.300.569.816			2.415.598.307
0.00.	00	1	02	09	01	008	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercipta lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	Provinsi Aceh	12 bulan	1.001.760.000			1.051.848.000
0.00.	00	1	02	09	01	010	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional perkantoran	Provinsi Aceh	12 bulan	653.400.000			686.070.000
0.00.	00	1	02	09	01	011	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Provinsi Aceh	12 bulan	470.800.000			494.340.000
0.00.	00	1	02	09	01	012	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat - alat listrik dan elektronik	Provinsi Aceh	12 bulan	149.688.000			157.172.400
0.00.	00	1	02	09	01	013	7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya dana untuk pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Provinsi Aceh	12 bulan	947.429.478			994.800.952
0.00.	00	1	02	09	01	015	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan (media massa)	Provinsi Aceh	12 bulan	590.841.660			620.383.743
0.00.	00	1	02	09	01	017	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	Provinsi Aceh	12 bulan	620.115.000			651.120.750
0.00.	00	1	02	09	01	018	10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas	Provinsi Aceh	12 bulan	1.324.772.500			1.391.011.125
0.00.	00	1	02	09	01	022	11 Peningkatan pelayanan jasa perkantoran	Pembayaran honorarium Tim/ Pejabat/ Peneliti/ Pemeriksa, Tenaga Kontrak	Provinsi Aceh	12 bulan	3.885.172.000			4.079.430.600
		09	**01**	**02**	**02**		**2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**				**16.962.067.294**			**17.810.170.659**
0.00.	00	1	02	09	02	003	1 Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor untuk kelancaran pelayanan publik	Provinsi Aceh	80%	8.612.593.062			9.043.222.715
0.00.	00	1	02	09	02	005	2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan operasional Dinas	Provinsi Aceh	80%	1.498.021.800			1.572.922.890
0.00.	00	1	02	09	02	007	3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dana untuk pengadaan fasilitas perlengkapan kantor	Provinsi Aceh	80%	312.276.884			327.890.728
0.00.	00	1	02	09	02	009	4 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya alat-alat untuk kelancaran kerja	Provinsi Aceh	80%	1.691.097.313			1.775.652.179
0.00.	00	1	02	09	02	010	5 Pengadaan Meubeulair	Tersedianya meubeulair pendukung kerja	Provinsi Aceh	80%	700.611.268			735.641.831
0.00.	00	1	02	09	02	013	6 Pengadaan Komputer	Tersedianya perangkat komputer dan studio untuk operasional	Provinsi Aceh	80%	938.185.303			985.094.568
0.00.	00	1	02	09	02	022	7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas prasarana kantor	Provinsi Aceh	80%	961.503.423			1.009.578.594
0.00.	00	1	02	09	02	024	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor yang siap pakai	Provinsi Aceh	80%	1.327.427.000			1.393.798.350

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.	00	1	02	09	02	028	9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas peralatan gedung kantor	Provinsi Aceh	80%	853.251.241			895.913.803
0.00.	00	1	02	09	02	029	10 Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair	Persentase jumlah meubeulair yang terawat	Provinsi Aceh	80%	45.100.000			47.355.000
0.00.	00	1	02	09	02	036	11 Pemeliharaan rutin/berkala sound system	Persentase sound system yang siap pakai	Provinsi Aceh	80%	22.000.000			23.100.000
0.00.	**00**	**1**	**02**	**09**	**03**		**3. Peningkatan Disiplin Aparatur**				**350.107.560**			**367.612.938**
0.00.	00	1	02	09	03	002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya kelengkapan aparatur dalam pelayanan publik	Provinsi Aceh	80%	350.107.560			367.612.938
0.00.	00	1	02	09	05		**4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**1.420.179.000**			**1.491.187.950**
0.00.	00	1	02	09	05	001	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang dihasilkan	Provinsi Aceh	80%	872.976.000			916.624.800
0.00.	00	1	02	09	05	032	2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah SDM Teknis yang dihasilkan	Provinsi Aceh	80%	547.203.000			574.563.150
1	**02**	**1**	**02**	**09**	**17**		**5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**				**5.128.081.031**			**5.384.485.083**
1	09	1	02	09	17	001	1 Pembinaan penyelenggaraan angkutan umum	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	337.936.099			354.832.904
1	09	1	02	09	17	002	2 Pemilihan Perusahaan AKDP dan AKAP terbaik	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	115.530.201			121.306.711
1	09	1	02	09	17	003	3 Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	691.318.701			725.884.636
1	09	1	02	09	17	004	4 Pengaturan Kelancaran lalu Lintas penyelenggaraan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Terlaksananya pengaturan kelancaran lalu lintas penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi haji	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	93.342.584			98.009.713
1	09	1	02	09	17	005	5 Penyelenggaraan Transportasi Publik untuk Event Daerah, Nasional dan Internasional	Terselenggaranya transportasi publik untuk event daerah, nasional maupun internasional	Provinsi Aceh	8 Kegiatan	599.754.400			629.742.120
1	09	1	02	09	17	006	6 Pelayanan transportasi Tamu Negara/Daerah	Tersedianya pelayanan transportasi tamu negara/daerah	Provinsi Aceh	8 Kegiatan	599.190.400			629.149.920
1	09	1	02	09	17	007	7 Kegiatan Antisipasi Stagnansi Angkutan Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Tertanganinya stagnasi angkutan pada kondisi tanggap darurat bencana	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	154.960.012			162.708.013
1	09	1	02	09	17	008	8 Perencanaan Pembangunan Fasilitas Disabilitas pada angkutan massal perkotaan	Tersedianya perencanaan pembangunan fasilitas disabilitas pada angkutan massal perkotaan	Provinsi Aceh	1 Dokumen	249.925.787			262.422.076
1	09	1	02	09	17	009	9 Pembinaan Bengkel Karoseri	Telaksananya pembinaan terhadap bengkel karoseri	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	224.151.844			235.359.436
1	09	1	02	09	17	010	10 Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya penertiban angkutan umum (razia)	Provinsi Aceh	10 Kegiatan	309.780.540			325.269.567
1	09	1	02	09	17	011	11 Wahana Tata Nugraha	Terlaksananya kegiatan Wahana Tata Nugraha	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	299.446.660			314.418.993
1	09	1	02	09	17	012	12 Forum Asistensi LLAJ / Unit Peneliti Kecelakaan / Sekretariat Andalalin	Telaksananya koordinasi pelaksanaan andalalin	Provinsi Aceh	1 Forum	109.881.796			115.375.886
2	09	1	02	09	17	013	13 Pembinaan Awak Angkutan Massal Trans Kutaraja	Terbinanya awak angkutan massal Trans Kutaraja	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	550.015.315			577.516.081
1	09	1	02	09	17	014	14 Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan transportasi Jalan	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	33.292.500			34.957.125
1	09	1	02	09	17	015	15 Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	414.928.864			435.675.307
1	09	1	02	09	17	016	16 Penyuluhan dan Pemilihan Pelajar Pelopor	Terlaksananya Penyuluhan dan pemilihan pelajar pelopor	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	170.917.391			179.463.261
1	09	1	02	09	17	017	17 Penyuluhan dan Pemilihan Abdiyasa Teladan	Terlaksananya penyuluhan dan pemilihan Abdiyasa teladan	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	173.707.937			182.393.334
1	**02**	**1**	**02**	**09**	**19**		**6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**				**10.996.124.925**			**11.545.931.171**

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.	09	1	02	09	19	001	1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Ruas Jalan Jl. Blangkejeren - Tongra- Batas Aceh Barat Daya dan Rambu Chevron pada ruas jalan Batas Pidie - Meulaboh	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	Provinsi Aceh	5 Lokasi	999.945.706			1.049.942.991
1.02.	09	1	02	09	19	002	2 Pengadaan marka jalan pada Lintasan jalan Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	Provinsi Aceh	3 Lokasi	974.965.684			1.023.713.968
1.02.	09	1	02	09	19	003	3 Pengadaan pagar pengaman jalan pada Ruas Jalan Batas Aceh Timur-Pining- Blangkejeren	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	Provinsi Aceh	3 Lokasi	969.693.133			1.018.177.790
1.02.	09	1	02	09	19	004	4 Pengadaan deliniator Pada Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	Provinsi Aceh	2 Lokasi	649.570.004			682.048.504
1.02.	09	1	02	09	19	005	5 Pengadaan traffic light (Pemeliharaan Traffic Light di Aceh Barat daya dan Aceh Selatan, Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di ruas jalan Lhosukon - Cot Girek, Pengawasan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	Provinsi Aceh	4 Lokasi	1.843.549.800			1.935.727.290
1.02.	09	1	02	09	19	009	6 Pengadaan cermin tikungan Pada Kab. Aceh Tengah, Lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Krueng Geukueh Kab. Aceh Utara	Terpasangnya Cermin Tikungan untuk Memandu Pengguna Jalan	Provinsi Aceh	2 Lokasi	548.320.044			575.736.046
1.02.	09	1	02	09	19	010	7 Pengadaan lampu penerangan jalan pada daerah rawan kecelakaan Sp. Turu - lutung - geumpang	Tersedianya Penerangan yang Cukup pada Terminal dan Daerah Rawan Kecelakaan	Provinsi Aceh	2 Lokasi	-			-
1.02.	09	1	02	09	19	011	8 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Ruas Jalan pada titik keramaian dan rawan kecelakaan lintasan Trumon - Singkil	Tersedianya Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi Aceh dan Daerah Rawan Kecelakaan di Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	2 Lokasi	399.997.480			419.997.354
1.02.	09	1	02	09	19	012	9 Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Gayo Lues - Babah Rot	Tersedianya Pagar Pengaman Jalan di ruas Jalan Provinsi	Provinsi Aceh	2 Lokasi	2.075.966.767			2.179.765.105
1.02.	09	1	02	09	19	013	10 Pemasangan Guardrail dan Rolling Guardrail /Barier pada lintasan Lokop - Gayo Lues dan lintasan Pining - Blang Kejeren	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan	Provinsi Aceh	1 Ruas	2.032.752.384			2.134.390.003
1.02.	09	1	02	09	19	014	11 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe				501.363.923			526.432.119
1.02.	09	1	02	09	19	015	12 Pengadaan Marka Jalan (Mata Kucing) pada Lintas Jalan Kabupaten Aceh Barat - Nagan Raya				-			-
1	**02**	**1**	**02**	**09**	**22**		**7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**				**207.639.686.256**			**218.021.670.572**
1.02.	09	1	02	09	22	001	1 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Tersedianya DLH Pelabuhan penyeberangan Sibigo	Provinsi Aceh	1 Dokumen	1.199.993.557			1.259.993.235
1.02.	09	1	02	09	22	002	2 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Tersedianya RIP Pelabuhan Penyeberangan Sibigo	Provinsi Aceh	1 Dokumen	-			-
1.02.	09	1	02	09	22	003	3 Rencana Induk Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi Aceh	Tersedianya RI Kereta Api Perkotaan di Ibukota Provinsi	Provinsi Aceh	1 Dokumen	1.099.931.311			1.154.927.877
1.02.	09	1	02	09	22	004	4 Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi	Terciptanya Koordinasi dalam pembangunan dan pengembangan moda transportasi Terlaksananya Koordinasi pembangunan dan pengembangan moda transportasi	Provinsi Aceh	1 Kali; 2 Kali	1.050.377.184			1.102.896.043
1.02.	09	1	02	09	22	006	5 Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan	Tersedianya regulasi di bidang perhubungan	Provinsi Aceh	6 Ranpergub	749.787.500			787.276.875
1.02.	09	1	02	09	22	007	6 Pemeliharaan SBNP	Terlaksananya Pemiliharaan SBNP	Provinsi Aceh	7 Lokasi 15 Unit	300.916.000			315.961.800
1.02.	09	1	02	09	22	008	7 Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Pantai Barat - Simeulue (Kontrak Tahun Jamak)	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Provinsi Aceh	1 Kapal 1 Lintasan	42.510.000.000			44.635.500.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.	09	1	02	09	22	009	8 Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Ulee Lheue - Balohan (Kontrak Tahun Jamak)	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Provinsi Aceh	1 Kapal 1 Lintasan	34.001.000.000			35.701.050.000
1.02.	09	1	02	09	22	010	9 Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro untuk Lintasan Singkil - Pulau Banyak (Kontrak Tahun Jamak)	Terlaksananya Pembangunan Kapal Ferry Ro-ro	Provinsi Aceh	1 Kapal; 1 Lintasar	22.679.725.000			23.813.711.250
1.02.	09	1	02	09	22	011	10 Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Perairan	Terselenggaranya pengawasan pelayanan angkutan perairan	Provinsi Aceh	1 Tahun	2.279.600.087			2.393.580.091
1.02.	09	1	02	09	22	012	11 Pengadaan Bus Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	5 unit	5.073.692.700			5.327.377.335
1.02.	09	1	02	09	22	013	12 Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	13.773.090.483			14.461.745.007
1.02.	09	1	02	09	22	014	13 Pembangunan Halte Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	3.878.958.220			4.072.906.131
1.02.	09	1	02	09	22	015	14 Pengadaan Halte Portable	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	387.890.061			407.284.564
1.02.	09	1	02	09	22	016	15 Pengadaan dan Instalasi CCTV dan Digital Signage Outdoor pada Halte Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	-			-
1.02.	09	1	02	09	22	017	16 Pengadaan dan pemasangan perangkat E-Ticketing system angkutan Massal Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	-			-
1.02.	09	1	02	09	22	018	17 Pengadaan kelengkapan atribut awak kendaraan Bus Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	199.786.400			209.775.720
1.02.	09	1	02	09	22	019	18 Pemeliharaan Gedung dan perlengkapan Operasional Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	1.349.301.057			1.416.766.110
1.02.	09	1	02	09	22	020	19 Pemeliharaan Digital Sigange pada Halte Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	50.000.000			52.500.000
1.02.	09	1	02	09	22	021	20 Pemeliharaan aksessoris interior dan eksterior Bus Trans Kutaraja	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	242.000.000			254.100.000
1.02.	09	1	02	09	22	022	21 Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Terlaksananya Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Provinsi Aceh	12 Bulan	917.282.427			963.146.548
1.02.	09	1	02	09	22	023	22 Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie	Terlaksananya revitalisasi Terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	10.105.110.951			10.610.366.499
1.02.	09	1	02	09	22	024	23 Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie Jaya	Terlaksananya revitalisasi Terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	-			-
1.02.	09	1	02	09	22	025	24 Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	12.969.194.922			13.617.654.668
1.02.	09	1	02	09	22	026	25 Revitalisasi Terminal Tipe B Kuala Simpang	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	2.268.502.635			2.381.927.767
1.02.	09	1	02	09	22	027	26 Revitalisasi Terminal Tipe B Calang	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	1.826.586.300			1.917.915.615
1.02.	09	1	02	09	22	028	27 Revitalisasi Terminal Tipe B Blang Pidie	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	4.697.559.438			4.932.437.410
1.02.	09	1	02	09	22	029	28 Revitalisasi Terminal Tipe B Singkil	Terlaksananya revitalisasi terminal tipe B	Provinsi Aceh	1 Terminal	570.463.300			598.986.465
1.02.	09	1	02	09	22	030	29 Pemeliharaan Gedung VIP Bandara SIM	Terciptanya pelayanan transportasi yang aman dan nyaman	Provinsi Aceh	12 Bulan	1.732.052.093			1.818.654.698
1.02.	09	1	02	09	22	031	30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan	Provinsi Aceh	12 Bulan	1.128.980.000			1.185.429.000
1.02.	09	1	02	09	22	032	31 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (Migas Kabupaten/Kota)	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buang	Provinsi Aceh	1 Set	262.781.750			275.920.838
1.02.	09	1	02	09	22	033	32 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (Migas Kabupaten/Kota)	Meningkatnya Pengelolaan Tempat Parkir Angkutan Barang	Provinsi Aceh	0,74	3.500.435.932			3.675.457.729
1.02.	09	1	02	09	22	034	33 Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan (Migas Kabupaten/Kota)	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pengurusan pengujian kendaraan bermotor	Provinsi Aceh	1 Lokasi	137.297.497			144.162.372

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.	09	1	02	09	22	035	34 Pekerjaan Pagar Pembatas dan Drainase sisi Darat di Bandara Patiambang Kab. Gayo Lues		Provinsi Aceh		2.166.201.499			2.274.511.574
1.02.	09	1	02	09	22	036	35 Kajian Pelayaran di Kabupaten Aceh Singkil	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	Provinsi Aceh	1 Kepulauan	500.802.776			525.842.915
1.02.	09	1	02	09	22	037	36 DED Pembangunan Dermaga Tambat di Kepulauan Kab. Aceh Singkil	Terciptanya kegiatan perencanaan pembangunan pelabuhan	Provinsi Aceh	1 Kepulauan	1.454.617.300			1.527.348.165
1.02.	09	1	02	09	22	038	37 Peningkatan fasisilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	Provinsi Aceh	1 Pelabuhan	22.533.070.670			23.659.724.204
1.02.	09	1	02	09	22	039	38 Pembebasan Lahan Pengemb. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang	Terciptanya peningkatan dan pengembangan prasarana pelabuhan	Provinsi Aceh	1 Kegiatan	2.000.353.900			2.100.371.595
1.02.	09	1	02	09	22	040	39 Pembebasan Lahan Perluasan Bandara Lasikin		Provinsi Aceh		1.040.450.000			1.092.472.500
1.02.	09	1	02	09	22	041	40 Rehabilitasi Causeway dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan	Terciptanya peningkatan prasarana pelabuhan	Provinsi Aceh	1 Pelabuhan	2.637.047.000			2.768.899.350
1.02.	09	1	02	09	22	042	41 Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Kuala Bubon		Provinsi Aceh		2.182.423.153			2.291.544.311
1.02.	09	1	02	09	22	043	42 Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Singkil		Provinsi Aceh		2.182.423.153			2.291.544.311